

# LAPORAN TINDAK LANJUT

**HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI  
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR  
KELAS I A KHUSUS  
TRIWULAN III TAHUN 2024**

**Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi  
Nomor 14 Tahun 2017**



## LEMBAR PENGESAHAN

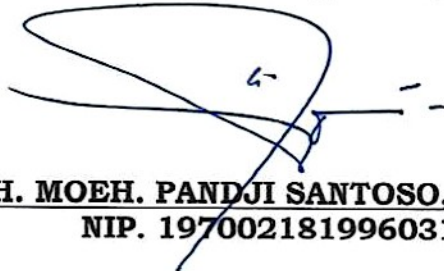
## LAPORAN TINDAK LANJUT

**HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI  
PADA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR  
KELAS IA KHUSUS  
TRIWULAN III TAHUN 2024**

Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi  
Nomor 14 Tahun 2017


Disahkan di Makassar  
Pada Hari Senin, 14 Oktober 2024

Top Management,




**H. MOEH. PANDJI SANTOSO, S.H., M.H**  
**NIP. 197002181996031003**

Sekretaris Tim Survei,



**NURIYA AWAD, S.H.**  
**NIP. 197503302000032002**

Ketua Tim Survey



**SUTISNA SAWATI, S.H.**  
**NIP. 197311231999031007**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahNya sehingga kami Tim Survey Pengadilan Negeri Makassar mampu menyelesaikan Laporan Tindak Lanjut Hasil Survey Persepsi Anti Korupsi TRIWULAN III Tahun 2024.

Filosofi dasar yang digunakan dalam pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang dapat diartikan bahwa kepuasan pelanggan dalam hal kualitas pelayanan bisa dijelaskan/diukur dengan membandingkan persepsi pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diinginkan/diharapkan. Survei ini menanyakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, yang diambil secara elektronik dengan menggunakan Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SISUPER).

Semoga hasil laporan ini dapat menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan dan bermanfaat jbagi upaya peningkatan kualita pelayanan seluruh unit pelayanan di Pengadilan Negeri Makassar.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Makassar, 21 Oktober 2024

**Tim Survei**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>1</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>3</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>4</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>5</b>
A. Latar Belakang .....	5
B. Tujuan dan Sasaran.....	6
C. Prinsip .....	6
D. Pelaksanaan .....	7
E. Tahapan Pelaksanaan.....	7
<b>BAB II HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN.....</b>	<b>8</b>
<b>BAB III RENCANA TINDAK LANJUT 3 (TIGA) UNSUR TERENDAH HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT .....</b>	<b>10</b>
<b>BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....</b>	<b>20</b>
A. Kesimpulan.....	20
B. Rekomendasi.....	20
<b>RUJUKAN: .....</b>	<b>22</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN. ....</b>	<b>23</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar. Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

## **B. Tujuan dan Sasaran**

Maksud Penyusunan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

## **C. Prinsip**

Dalam melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan memperhatikan prinsip:

### **1. Transparan**

Hasil survey persepsi anti korupsi harus dipublikasikan pada website resmi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat

### **2. Partisipatif**

Dalam melaksanakan survey melibatkan peran serta masyarakat serta pihak terkait lainnya untuk mendapatkan hasil survey yang sebenarnya

### **3. Akuntabel**

Hal-hal yang diatur dalam Survey persepsi anti korupsi harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara benar dan konsisten kepada pihak yang berkepentingan berdasarkan kaidah umum yang berlaku

### **4. Berkesinambungan**

Survey persepsi anti korupsi dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan peningkatan kualitas pelayanan

### **5. Keadilan**

Pelaksanaan Survey persepsi anti korupsi harus menjangkau semua pengguna layanan tanpa membedakan status ekonomi, budaya, agama,

#### 6. Netralitas

Dalam melaksanakan Survey persepsi anti korupsi, surveyor tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, golongan dan tidak berpihak.

### D. Pelaksanaan

Pengukuran/survei Persepsi Anti Korupsi (IPAK) di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus ini dilaksanakan pada bulan JULI - SEPTEMBER 2024.

### E. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan survei Persepsi Anti Korupsi (IPAK) di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus , antara lain:

1. Tim survei menentukan metode survei, yaitu dengan metode kuantitatif dan sampel diambil dengan **Teknik Sampel Morgan dan Krejcie**.
2. Tim survei menyiapkan fasilitas untuk pengambilan responden secara elektronik yaitu 1 komputer /pc, melalui Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SISUPER) dimana instrument kuesioner pada Aplikasi ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik
3. Memastikan bahwa computer/pc yang digunakan untuk melaksanakan survei sudah terkoneksi dengan internet
4. Membuka browser / peramban halaman website
5. Membuka alamat website :  
<http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/099422>
6. Tim survei melakukan survei sesuai jadwal.
7. Tim survei menyajikan hasil analisa dalam bentuk analisis statistik deskriptif.

## BAB II

### HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN

Kuesioner yang terkumpul dan terisi dengan lengkap pada Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) sejumlah 104 data. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dan hasil analisis data yang telah dilakukan (lihat lampiran) diketahui bahwa Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus sebesar **91,34 % atau pada nilai 3,65**.

Hasil IPAK tersebut di atas, terdiri dari sepuluh ruang lingkup, analisis selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap kesembilan ruang lingkup tersebut.

Tabel 6  
Hasil  
Pengukuran Indeks Persepsi Anti Korupsi Pengadilan  
di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-rata
U1	Manipulasi Peraturan	3,643
U2	Penyalahgunaan Jabatan	3,893
U3	Menjual Pengaruh	3,821
U4	Transaksi Biaya	3,107
U5	Biaya Tambahan	3,393
U6	Hadiah	3,607
U7	Transparansi Biaya	3,714
U8	Percaloan	3,857
U9	Perbuatan Curang	3,643
U10	Transaksi Rahasia	3,857
	Total	<b>36,5</b>
	Rata Rata	<b>3,65</b>

Berikut ini 3 unsur terendah pada Hasil Survey Persepsi Anti Korupsi




<b>No.</b>	<b>Ruang Lingkup</b>	<b>Indeks</b>	<b>Nilai</b>
<b>1</b>	Indikator Hadiah (U6)	3,607	101
<b>2</b>	Indikator Biaya Tambahan (U5)	3,393	95
<b>3</b>	Indikator Transaksi Biaya (U4)	3,107	87

Adapun Tindak Lanjut Hasil Survey Persepsi Anti Korupsi TRIWULAN III Tahun 2024 akan disajikan pada Bab 3.

### BAB III TINDAK LANJUT HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI

Adapun Tindak Lanjut 3 unsur terendah yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Makassar untuk meningkatkan pelayanan yaitu sebagai berikut.

No	Prioritas Unsur	Program/Kegiatan	Tindak Lanjut
1.	Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta?) (U6)	Mengarahkan para petugas PTSP agar tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun.	<p>Memberikan pembekalan kepada petugas PTSP agar bekerja dengan Ikhlas dan penuh integritas dalam rangka peningkatan pelayanan Pengadilan Negeri Makassar yang prima. Seluruh Petugas PTSP diingatkan untuk menjaga integritas, bekerja seara Ikhlas, professional, dan penuh tanggung jawab.</p> <p>Berikut ini kegiatan yang dipimpin oleh Ibu Muzdalifah Muslimin, S.H., M.H., Panitera Muda Pidana</p> <div style="text-align: right;">  </div>

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS I A KHUSUS		Tempat	
Jalan R. A. KARTINI NO. 18/23 Makassar		Distrik	
FORM NOTULEN		Tanggal	
KRISTING PTSP		Makassar 2 Juni 2	

DOCUMENTAIR APUL FAD1



Download images from Google

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS I A KHUSUS		Tempat	
Jalan R. A. KARTINI NO. 18/23 Makassar		Distrik	
FORM NOTULEN		Tanggal	
KRISTING PTSP		Makassar 2 Juni 2	

DOCUMENTAIR APUL S05E



Download images from Google

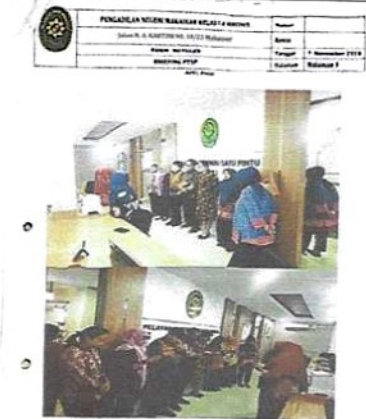
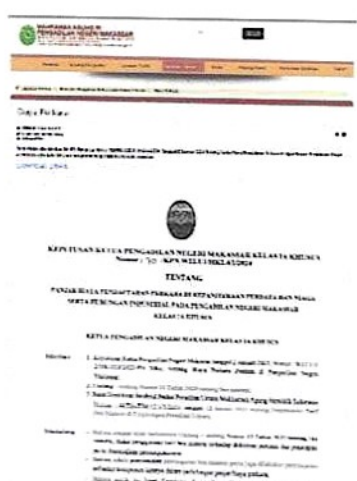
2. Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan? (U5)

Mengarahkan para petugas PTSP agar tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun diluar tarif/biaya resmi.

Memberikan pembekalan kepada seluruh petugas PTSP agar senantiasa mengikuti SOP dalam melayani masyarakat. Petugas PTSP juga senantiasa diingatkan agar menjaga integritas demi nama baik instansi dan pribadi.

Berikut ini salah satu kegiatan yang dipimpin oleh Kepala Bagian Umum. Ibu Andi Asni



			
<p>3.</p>	<p>Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan? (U4)</p>	<p>Mempublikasikan seluruh informasi biaya/tarif pelayanan melalui media sosial</p>	<p>Berikut ini biaya/tarif pelayanan yang telah dipublikasikan di website resmi PN Makassar Kelas I A Khusus <a href="https://pn-makassar.go.id/website/index.php/layanan-hukum/prosedur-berperkara/biaya-perkara">https://pn-makassar.go.id/website/index.php/layanan-hukum/prosedur-berperkara/biaya-perkara</a>.</p> 

1. PERBAK dan PERBAK KEMUDAIAN BERKUALITAS (Dititik atau dengan dasar Rp 200.000,00)

A.1. Paket Layanan (Perbaikan dan Perbaikan Kelas Berharga Tertinggi)

No	URAIAN	BIAYA
1	Biaya PPKP Perbaikan	Rp 10.000,-
2	Biaya Perbaikan	Rp 10.000,-
3	Biaya Perbaikan	Rp 10.000,-
4	Biaya Perbaikan	Rp 10.000,-
5	Biaya Perbaikan	Rp 10.000,-
6	Biaya Perbaikan	Rp 10.000,-
7	Biaya Perbaikan	Rp 10.000,-
8	Biaya Perbaikan	Rp 10.000,-
9	Biaya Perbaikan	Rp 10.000,-
10	Biaya Perbaikan	Rp 10.000,-

A.2. Paket Layanan (Perbaikan dan Perbaikan Kelas Berharga Tertinggi)

No	URAIAN	BIAYA
1	Biaya PPKP Perbaikan	Rp 10.000,-
2	Biaya Perbaikan	Rp 10.000,-
3	Biaya Perbaikan	Rp 10.000,-
4	Biaya Perbaikan	Rp 10.000,-
5	Biaya Perbaikan	Rp 10.000,-
6	Biaya Perbaikan	Rp 10.000,-
7	Biaya Perbaikan	Rp 10.000,-
8	Biaya Perbaikan	Rp 10.000,-
9	Biaya Perbaikan	Rp 10.000,-
10	Biaya Perbaikan	Rp 10.000,-

Keterangan

- 1. Biaya Perbaikan dan perbaikan, harga dasar ditetapkan dengan standar harga pasar.
- 2. Biaya Perbaikan dan perbaikan, Rp 10.000,- (tidak termasuk persentase). (100%)
- 3. Biaya dan biaya yang lain termasuk dalam kategori biaya perbaikan/perbaikan/perbaikan.

- 1. Biaya Keras (Material) dan Biaya (PKP) Rp 10.000,-

2. Biaya Keras (Material) dan Biaya (PKP) Rp 10.000,-

3. Biaya Keras (Material) dan Biaya (PKP) Rp 10.000,-

4. Biaya Keras (Material) dan Biaya (PKP) Rp 10.000,-

No	URAIAN	BIAYA
1	Biaya PPKP Perbaikan	Rp 10.000,-
2	Biaya Perbaikan	Rp 10.000,-
3	Biaya Perbaikan	Rp 10.000,-
4	Biaya Perbaikan	Rp 10.000,-
5	Biaya Perbaikan	Rp 10.000,-
6	Biaya Perbaikan	Rp 10.000,-
7	Biaya Perbaikan	Rp 10.000,-
8	Biaya Perbaikan	Rp 10.000,-
9	Biaya Perbaikan	Rp 10.000,-
10	Biaya Perbaikan	Rp 10.000,-

A.2. Paket Layanan (Perbaikan dan Perbaikan Kelas Berharga Tertinggi)

No	URAIAN	BIAYA
1	Biaya PPKP Perbaikan	Rp 10.000,-
2	Biaya Perbaikan	Rp 10.000,-
3	Biaya Perbaikan	Rp 10.000,-
4	Biaya Perbaikan	Rp 10.000,-
5	Biaya Perbaikan	Rp 10.000,-
6	Biaya Perbaikan	Rp 10.000,-
7	Biaya Perbaikan	Rp 10.000,-
8	Biaya Perbaikan	Rp 10.000,-
9	Biaya Perbaikan	Rp 10.000,-
10	Biaya Perbaikan	Rp 10.000,-

A.3. Paket Layanan (Perbaikan dan Perbaikan Kelas Berharga Tertinggi)

No	URAIAN	BIAYA
1	Biaya PPKP Perbaikan	Rp 10.000,-
2	Biaya Perbaikan	Rp 10.000,-
3	Biaya Perbaikan	Rp 10.000,-
4	Biaya Perbaikan	Rp 10.000,-
5	Biaya Perbaikan	Rp 10.000,-
6	Biaya Perbaikan	Rp 10.000,-
7	Biaya Perbaikan	Rp 10.000,-
8	Biaya Perbaikan	Rp 10.000,-
9	Biaya Perbaikan	Rp 10.000,-
10	Biaya Perbaikan	Rp 10.000,-

Keterangan

- 1. Biaya Perbaikan dan perbaikan, harga dasar ditetapkan dengan standar harga pasar.
- 2. Biaya Perbaikan dan perbaikan, Rp 10.000,- (tidak termasuk persentase). (100%)
- 3. Biaya dan biaya yang lain termasuk dalam kategori biaya perbaikan/perbaikan/perbaikan.

- 1. Biaya Keras (Material) dan Biaya (PKP) Rp 10.000,-

- 1. Biaya Keras (Material) dan Biaya (PKP) Rp 10.000,-

- 1. Biaya Keras (Material) dan Biaya (PKP) Rp 10.000,-

- 1. Biaya Keras (Material) dan Biaya (PKP) Rp 10.000,-

A.1. Paket Perbaikan (Perbaikan dan Perbaikan Kelas Berharga Tertinggi)

No	URAIAN	BIAYA
1	Biaya PPKP Perbaikan	Rp 10.000,-
2	Biaya Perbaikan	Rp 10.000,-
3	Biaya Perbaikan	Rp 10.000,-
4	Biaya Perbaikan	Rp 10.000,-
5	Biaya Perbaikan	Rp 10.000,-
6	Biaya Perbaikan	Rp 10.000,-
7	Biaya Perbaikan	Rp 10.000,-
8	Biaya Perbaikan	Rp 10.000,-
9	Biaya Perbaikan	Rp 10.000,-
10	Biaya Perbaikan	Rp 10.000,-

A.2. Paket Perbaikan (Perbaikan dan Perbaikan Kelas Berharga Tertinggi)

No	URAIAN	BIAYA
1	Biaya PPKP Perbaikan	Rp 10.000,-
2	Biaya Perbaikan	Rp 10.000,-
3	Biaya Perbaikan	Rp 10.000,-
4	Biaya Perbaikan	Rp 10.000,-
5	Biaya Perbaikan	Rp 10.000,-
6	Biaya Perbaikan	Rp 10.000,-
7	Biaya Perbaikan	Rp 10.000,-
8	Biaya Perbaikan	Rp 10.000,-
9	Biaya Perbaikan	Rp 10.000,-
10	Biaya Perbaikan	Rp 10.000,-









DINAS PERUSAHAAN		KETERANGAN	
Biaya Listrik	Rp. 10.000,00		
Biaya Air	Rp. 500,00		
Biaya Sewa	Rp. 100,00		
Biaya Transportasi	Rp. 100,00		
Biaya Komunikasi	Rp. 100,00		
Biaya Lain-lain	Rp. 100,00		
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 10.800,00</b>		
<b>REKAPITULASI</b>			
Biaya Listrik	Rp. 10.000,00		
Biaya Air	Rp. 500,00		
Biaya Sewa	Rp. 100,00		
Biaya Transportasi	Rp. 100,00		
Biaya Komunikasi	Rp. 100,00		
Biaya Lain-lain	Rp. 100,00		
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 10.800,00</b>		
<b>REKAPITULASI</b>			
Biaya Listrik	Rp. 10.000,00		
Biaya Air	Rp. 500,00		
Biaya Sewa	Rp. 100,00		
Biaya Transportasi	Rp. 100,00		
Biaya Komunikasi	Rp. 100,00		
Biaya Lain-lain	Rp. 100,00		
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 10.800,00</b>		

Dinas Peradilan Makassar  
 Pengeluaran uang telah dibayar dengan cek No. 100/2024  
 10/11/2024  
 (Stempel dan Tanda Tangan)

Memberikan pembekalan kepada petugas PTSP dalam rangka peningkatan kompetensi pelaksana sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari kerja sebelum Petugas PTSP melaksanakan tugas.

Berikut kegiatan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Bapak YM. H. Moehammad Pandji Santoso, S.H., M.H., Kegiatan ini juga dihadiri oleh Panitia Muda PHI, Ibu Andi Siti Nurasiawati, S.H., dan Ibu Muzdalifah Muslimin, S.H., M.H. pada hari Senin, tanggal 11 November 2024.

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS I A KHUSUS Jalan R. A. KARTINI NO. 18/23 Makassar FORM NOTULEN BRIEFING PTSP		Nomor Revisi Tanggal Halaman 1 dari 2
HARI/TANGGAL Hari, 11 November 2024	KETERANGAN LAMPUKAN	
LOKAS BRIEFING AREA PTSP	<input type="checkbox"/> DOKUMENTAS	
WAKTU 08.15 WITA	AKHIR 08.30 WITA	
PENANGGUNG JAWAB MUHAMMAD FANZI SANTOSO, S.H., M.H. ( Wakil Ketua) ANDI UTI NURADAWATI, S.H. ( Panitera Muda PHU) MUZALIFAN MUSLIM, S.H., M.H. ( Panitera Muda Pidana)		
NOTULEN BENEDIKTA TANDILINO, S.K.		
BAHASAN MATERI BRIEFING		
CATATAN		KESIMPULAN
<p><b>Briefing Pagi</b>                  Briefing Pagi dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Muhammad Fandi Santoso, S.H., M.H., didampingi Panitera Muda PHU, Andi Siti Nurawati, SH dan Panitera Muda Pidana, Muzalifan Muslim, S.H., M.H. selaku Penanggung Jawab Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 membahas pengalihan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengas PTSP harus dijaga dan tidak ada pada saat jam pelayanan masa jeda dan komputer agar sudah diaktifkan dan dipersiapkan untuk bertugas, termasuk dengan setting dan tesnya agar sudah diaktifkan</li> <li>Berkas dengan surat surat yang bersifat rahasia, pada aplikasi DWAS diminta agar jangan dibuka kembali</li> </ul>		<p>Berdasarkan pengalihan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Muhammad Fandi Santoso, S.H., M.H., Panitera Muda PHU, Andi Siti Nurawati, SH dan Panitera Muda Pidana, Muzalifan Muslim, S.H., M.H. selaku Penanggung Jawab PTSP pada hari Senin tanggal 11 November 2024 kepada seluruh petugas PTSP:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Agar diperhatikan dan dilaksanakan</li> <li>Agar diperhatikan dan dilaksanakan</li> </ul>

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS I A KHUSUS Jalan R. A. KARTINI NO. 18/23 Makassar FORM NOTULEN BRIEFING PTSP		Nomor Revisi Tanggal Halaman 2 dari 2
Ketua, Wakil Ketua dan Panitera Muda Hubung		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Prosedur diharapkan juga sudah selalu siap dan stand by di tempat bertugas melayani pengguna layanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Agar diperhatikan dan dilaksanakan</li> </ul>	
<p>Pertemuan dari petugas PTSP, dimana membahas mengenai image dan Data Pelayanan, Lydia Sugan mengenai bank online menggunakan QR code atau pengguna pelayanan yang mau bertemu</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Agar diperhatikan dan dilaksanakan</li> </ul>	
<p><b>Briefing Sore</b>                  Briefing Pagi dipimpin oleh Panitera Muda PHU, Andi Siti Nurawati, SH selaku Penanggung Jawab Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 membahas pengalihan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengas PTSP untuk memberikan pelayanan apakah ada berkas atau benda yang dibuang selama melaksanakan tugas penyidik pelayanan harian</li> </ul>	<p>Berdasarkan pengalihan dari Panitera Muda PHU, Andi Siti Nurawati, SH selaku Penanggung Jawab PTSP pada hari Senin tanggal 11 November 2024 kepada seluruh petugas PTSP:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Agar diperhatikan dan diurusi secara tepat</li> </ul>	

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS I A KHUSUS Jalan R. A. KARTINI NO. 18/23 Makassar FORM NOTULEN BRIEFING PTSP		Nomor Revisi Tanggal Halaman 3 dari 2
TANDA TANGAN		
NOTULEN NAMA LENGKAP & TTD STAF PHU BENEDIKTA TANDILINO, SH	DISAHKAN NAMA LENGKAP & TTD WAKIL KETUA MUHAMMAD FANZI SANTOSO, SH PANITERA MUDA PHU ANDI UTI NURADAWATI, S.H. PANITERA MUDA PIDANA MUZALIFAN MUSLIM, S.H., M.H.	



## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data terhadap data penelitian ini, disimpulkan bahwa Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus sebesar **3,65** atau masuk pada kategori **Bersih dari Korupsi**. Adapun kesimpulan pada masing-masing ruang lingkup sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks **3,643**;
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks **3,893**;
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks **3,821**;
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks **3,107**;
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks **3,393**;
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks **3,607**;
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks **3,714**;
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks **3,857**;
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks **3,643**;
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks **3,857**;

#### **B. Rekomendasi**

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Makassar TRIWULAN III Tahun 2024 tersebut di atas, menunjukkan bahwa **mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3,4 atau masuk pada persepsi bersih dari korupsi**.

Kepada jajaran manajemen dan seluruh pegawai di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, hendaknya meningkatkan pelayanannya khususnya pada ruang lingkup Manipulasi Peraturan, Transaksi Biaya dan Hadiah. Berdasarkan hasil survei ini, ketiga ruang lingkup tersebut berada pada unsur terendah, sehingga untuk

melaksanakan pelayanan secara maksimal agar diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar Petugas PTSP meningkatkan kedisiplinan dalam mematuhi jam kerja pelayanan di meja PTSP
2. Agar Petugas PTSP memahami SOP pelayanan sehingga dapat memberikan pelayanan lebih baik lagi.
3. Agar Petugas PTSP diberikan pelatihan dan sosialisasi untuk SOP serta penerapan Reward dan Punishment
4. Agar Petugas PTSP senantiasa menyiapkan checklist di meja PTSP masing-masing

**RUJUKAN:**

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/ 2/2004 Tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Ridwan. 2008. Dasar-dasar Statistik. Penerbit Alfa Beta. Bandung.

Saifuddin Azwar. 2009. Penyusunan Skala Psikologi. Makassar: Pustaka Belajar

Sutrisno Hadi. 2003. Statistik Jilid 2. Penerbit ANDI Offset.

Sutrisno Hadi. 2003. Statistik Jilid 3 Penerbit ANDI Offset.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN.**

### APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK

Dashboard SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI  
 Survey Persepsi Anti Korupsi | SPAK

Form kuesioner untuk survey bagi pengguna layanan / pencari keadilan yang mengacu pada zona integritas dalam pelayanan Pengadilan.

**Data Responden**  
 Nama: [Kotak input] (Maksimal 200 karakter)  
 Umur / Jenis Kelamin: [Dropdown menu]  
 Nomor Hp: +62 [Kotak input] (Format: 81111222)  
 Domisili: [Dropdown menu]  
 Pendidikan: [Dropdown menu]  
 Pekerjaan: [Dropdown menu]

**Form Kuesioner**  
 Iklan form kuesioner SPAK

**Kesan & pesan**  
 Menulis kesan atau pesan Anda

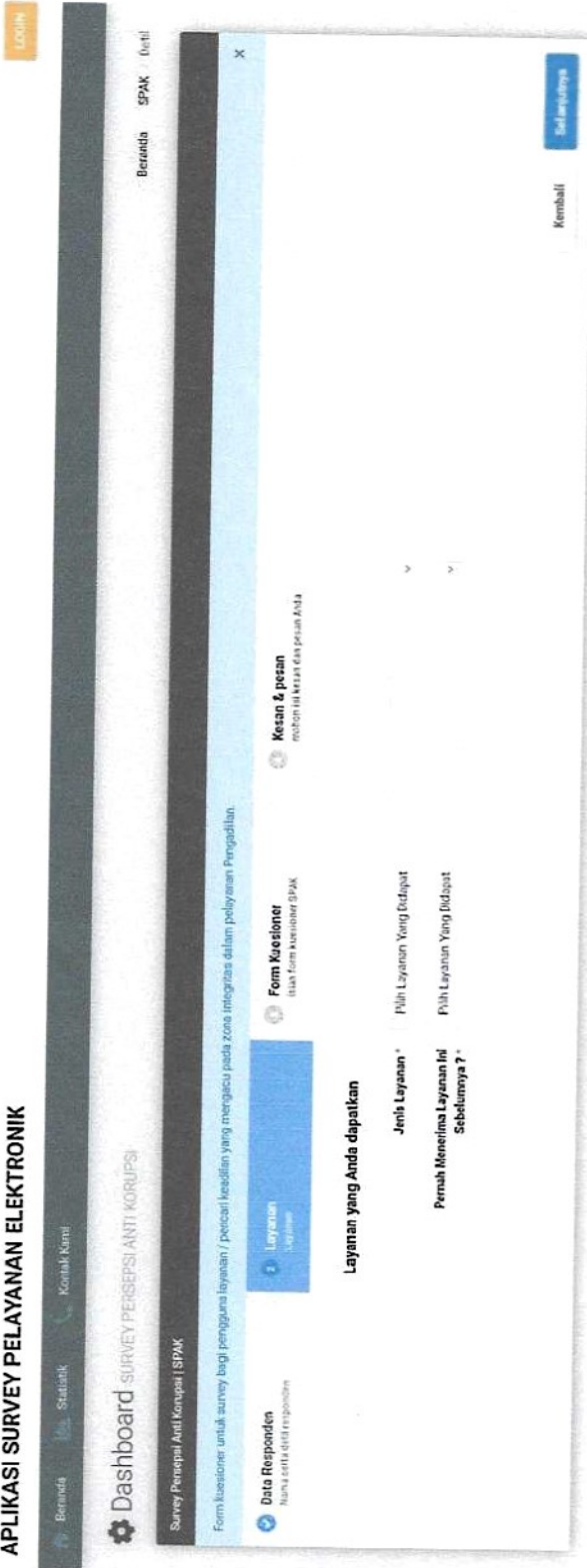
Baranda SPAK Dept

Logout

Kembali



# APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK



LOGOUT

Beranda SPAK | Berhal

## APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK

Beranda [Beranda](#) [Kembali](#)

Dashboard SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

Survei Persepsi Anti Korupsi - SPAK

Form kuesioner untuk survey bagi pengguna layanan / pencari keadilan yang mengisi pada masa integrasi dalam pelayanan Pengadilan.

**1** Data Responden  
Nama atau NID Responden

**2** Layanan  
Layanan

**3** Form Kuesioner  
Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)

**4** Kesan & pesan  
Tuliskan kesan dan pesan Anda

- Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?  
 Tidak Sesuai Prosedur  
 Jarang Sesuai Prosedur  
 Sering Sesuai Prosedur  
 Selalu Sesuai Prosedur
- Apakah dalam menyelesaikan layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyelesaian jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu?  
 Petugas melayani selalu meminta imbalan  
 Petugas melayani sering meminta imbalan  
 Petugas melayani jarang meminta imbalan  
 Petugas melayani tanpa meminta imbalan
- Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara?  
 Selalu  
 Sering  
 Jarang  
 Tidak Ada
- Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan?  
 Tidak Pernah  
 Jarang  
 Sering  
 Selalu
- Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?  
 Tidak Pernah  
 Jarang  
 Sering  
 Selalu
- Apakah memberikan tanda terima kash atas layanan yang diterima di Pengadilan (mungkin tidak diminta)?  
 Selalu  
 Sering  
 Jarang  
 Tidak Ada
- Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan?  
 Tidak Pernah  
 Jarang  
 Sering  
 Selalu
- Apakah pernah mengetahui ada praktik percoluan dalam pengurusan layanan di Pengadilan?  
 Selalu  
 Sering  
 Jarang  
 Tidak Ada
- Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktik KKN di Pengadilan?  
 Selalu  
 Sering  
 Jarang  
 Tidak Ada
- Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim / Panitera / Staf Pengadilan diluar pengadilan?  
 Selalu  
 Sering  
 Jarang  
 Tidak Ada

Kembali [Selesai](#)

**APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK**

Dashboard SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

Survey Persepsi Anti Korupsi | SIPAK

Form kuesioner untuk survey bagi pengguna layanan / jemaat keadaan yang mengacu pada zona integritas dalam pelayanan Pengadilan

**Data Responden**  
Nama seluruh responden

**Layanan**  
Layanan

**Form Kuesioner**  
Isi dari kuesioner SIPAK

**Kerjakan & pesan**  
Kerjakan & pesan

Mohon untuk mengisi kembali data pesan Anda untuk melanjutkan penyusunan kuesioner

Klik Kotak dibawah Saya bukan robot

Saya bukan robot

**Simpan Data**

Kembali



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR**  
 Jln. R.A. Kartini No. 18/23 KOTAMAKASSAR  
 SULAWESI SELATAN  
<http://www.pn-makassar.go.id/>



**PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI**

Periode 1 Juli 2024 sampai 30 September 2024

SURVEY PERSEPSI ANTI  
 KORUPSI

**NILAI INDEKS**

**3,65 / 91,34 %**

Jumlah	28 RESPONDEN	
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 20	PEREMPUAN : 8
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0	Diploma 2 : 0
	SD : 0	Diploma 3 : 0
	SMP : 0	S1 : 18
	SMU : 2	S2 : 8
	Diploma 1 : 0	S3 : 0
Pekerjaan	PNS : 0	SWASTA : 6
	TNI : 0	WIRUSAHA : 1
	POLRI : 0	TENAGA KONTRAK : 0
	LAINNYA : 21	

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

- |   |       |
|---|-------|
| 1. Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan ( meskipun tidak diminta ) ? | 3,607 |
| 2. Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan ?                         | 3,393 |
| 3. Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan ?                         | 3,107 |

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

DATA REGISTER TINDAK LANJUT BELUM DIISI

**Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.**

1 Oktober 2024  
 Ketua Pengadilan Negeri

-25-

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN  
 APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI  
 NOMOR 14 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENYUSUNAN SURVEI KEPUASAN  
 MASYARAKAT  
 UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK

Untuk memudahkan pengambilan sampel tanpa menghitung, dapat melihat pada tabel berikut :

**Tabel 1 Sampel Morgan dan Krejcie**

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367

-26-

130	97	650	242	9000	368
140	103	700	248	10000	370
150	108	750	254	15000	375
160	113	800	260	20000	377
170	118	850	265	30000	379
180	123	900	269	40000	380
190	127	950	274	50000	381
200	132	1000	278	75000	382
210	136	1100	285	1000000	384

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,

ttd

ASMAN ABNUR